

Konsep Pendidikan Islam Menuju Pembentukan *Civil Society*

H. Zainal Arifin

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan
Jl. Kl. Yos Sudarso No. 224 Medan, Sumatera Utara, 20115
e-mail: ust_zein@gmail.com

Abstrak

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab yang selalu menjunjung tinggi konsep pendidikan menuju masyarakat madani dan prinsip-prinsip masyarakat yang beradab yang telah diuraikan dalam pembahasan, yaitu: Keadilan sosial, Egalitarianisme, Pluralisme, Supremasi hukum. Masyarakat madani dalam pendidikan islam adalah pelaku atau subyek pendidikan untuk mewujudkan pendidikan islam yang beradab. konsep transformasi pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani selayaknya; (a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, (b) pendidikan menuju tercapainya sikap dan perilaku toleransi, lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (c) pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (d) pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur, dan (e) pendidikan Islam harus didisain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat madani.

Kata Kunci: Konsep, Pendidikan Islam, Civil Society

Pendahuluan

Masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan berbagai torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain, dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman, “diperlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru. Istilah

masyarakat madani merupakan penerjemahan dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini. Seperti, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (Lihat, QS. Ali Imran/3: 105). Dalam rangka membangun "masyarakat madani modern", meneladani Nabi bukan hanya penampilan fisik belaka, tapi sikap yang beliau peragakan saat berhubungan dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil kepada siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya.

Sedangkan mengenai pendidikan Islam Al-Attas mendefinisikan bahwa pendidikan Islam sebagai: pengenalan dan pengakuan, yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia, dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan-Nya, maka yang menjadi tujuan pendidikan Islam menurut Muhaimin mencakup tiga fokus, *pertama*, terbentuknya insan kamil (manusia yang universal) mempunyai wajah persaudaraan yang menumbuhkan sikap egalitarianisme, *Kedua*, terciptanya insan kaffah yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya dan ilmiah, *Ketiga*, penyadaran manusia sebagai hamba dan kholifah Allah.¹

¹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1991), h. 20.

Selanjutnya masyarakat madani yang dianalogikan dengan *civil society* adalah suatu kondisi masyarakat yang dilandasi oleh *civileze society* (masyarakat beradab),² karena *civileze society* menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani itu sendiri, yang tentunya harus ditegakkan atas landasan nilai-nilai etik moral transendental (adat dan agama) yang bersumber dari doktrin langit.³

Dari uraian di atas, ada beberapa persamaan antara pengertian Pendidikan Islam dengan masyarakat madani (*civil society*), di mana Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak manusia yang baik secara universal (*al-insan al-kamil*), yang bercirikan universalis dalam wawasan dan ilmu pengetahuannya. Sedangkan masyarakat madani (*civil society*) adalah kondisi di mana masyarakat mempunyai budi baik (beradab) yang dilandaskan sikap transendental (berdasarkan agama) yang bersumber dari doktrin langit (wahyu / ajaran Tuhan).

Jadi, sangatlah jelas hubungan antara Pendidikan Islam dengan masyarakat madani (*civil society*), karena di satu sisi jika dipahami bahwa Pendidikan Islam membentuk manusia yang beradab, maka follow – upnya adalah terbentuknya masyarakat yang beradab pula, atau dengan kata lain untuk mewujudkan masyarakat yang baik, adalah tugas pendidikan yang membentuk kepribadian masing-masing individu secara baik. Karena masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu. Dapat diambil konklusi awal, menurut penulis setidaknya ada dua keterkaitan antara Pendidikan Islam dan *civil society* yaitu: ada tiga unsur yang membentuk pendidikan, yaitu proses, kandungan dan penerima. Dengan kata lain proses disini disebut dengan metode yang dilakukan dalam pendidikan. Kandungan adalah kurikulum yang diajarkan dalam sebuah pendidikan. Sedangkan penerima adalah peserta dalam suatu kegiatan pendidikan, yaitu masyarakat itu sendiri. Jika, Pendidikan Islam sebagai nilai-nilai yang dapat diwujudkan secara kelembagaan misalnya lewat Pendidikan Agama Islam, maka

² Djohar, “Pendidikan yang Membebaskan sebagai Kontruksi Masyarakat Madani”, dalam *Membongkar ‘Mitos’ Masyarakat Madani*, Cet. ke – 1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2000), h.301.

³ Ahmad Syafii Ma’arif, *Universalisme Nilai – Nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Profetika* Vol. 1. No. 2 (Jakarta, 1999), h. 170.

tentunya Pendidikan Islam dengan sendirinya akan menjadi suplier tenaga ahli, atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral, beretika sosial atau dalam hal ini manusia yang baik, yaitu manusia universal sebagaimana disebut di atas, sehingga nantinya dapat berguna bagi masyarakat yang menjadi “konsumen” pendidikan tersebut. Keterkaitan filosofik Pendidikan Islam didasarkan pada nash Alquran dan Hadits. Ajaran – ajarannya tersebut secara faktual tergambar dalam setiap perintah maupun larangan yang terkandung di dalamnya seperti dalam Q.S. 109 : 1-6, dan Q.S. 60 : 8.

Pendidikan Pada Masa Rasulullah saw

Rasulullah saw mengajarkan Islam di rumah Arqam bin Arqom, tercatat 40 orang yang terdiri dari laki-laki dan wanita, dan dari beragam usia mulai dari 8 tahun sampai 50 tahun. Sementara itu dikalangan bangsa arab sendiri pada saat itu telah berkembang model pendidikan kuttab. Di kuttab ini diajarkan baca tulis dengan teks dasar puisi-puisi arab, pengajarannya sendiri berlangsung di rumah para guru. Pasca Islam hijrah ke Madinah, pendidikan model kuttab ini diberlakukan oleh Rasulullah dengan mengambil tempat di mesjid dan rumah guru dan fungsi kuttab pun dibagi menjadi dua macam, pertama mengajarkan baca tulis dan kedua mengajar Alquran dan dasar-dasar agama Islam.

Kuruikulum pendidikan Islam pada zaman Rasulullah adalah Alquran yang Allah turunkan sesuai kondisi dan situasi, kejadian dan peristiwa yang dialami umat saat itu. Selain itu Rasulullah menyuruh para sahabat mempelajari bahasa Asing.

Metode pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sangat bervariasi misalnya ceramah, dialog (ketika Muadz akan dikirim menjadi Gubernur Yaman), tanya jawab (sering para sahabat bertanya tentang suatu hukum dan rasul menjawabnya), diskusi (misalnya diskusi yang terjadi antara Rasulullah dan para sahabat tentang hukuman yang akan diberikan pada tawanan perang Badar), demonstrasi, misalnya hadis, “shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat” dan metode kisah (misalnya kisah kaum nabi-nabi terdahulu), metafora (umat muslim laksana satu tubuh, bila sakit salah satu anggota tubuh, maka yang

lain akan turut sakit), dengan metode pembiasaan (yaitu membiasakan shalat berjamaah), hafalan, inferensi/prediksi (misalnya kelak umat islam akan seperti sepotong kue yang diperebutkan oleh banyak orang).

Rasulullah pun melakukan evaluasi pengajaran, dengan cara mengevaluasi hapalan para shahabat, menyuruh para shahabat membacakan Alquran dihadapannya dan membetulkan hapalan dan bacaan yang keliru, dan setiap utusan yang akan dikirim oleh Rasulullah maka akan diuji dulu kemampuannya. Misalnya ketika akan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai qadi, Rasulullah menanyakan bagaimana ia memutuskan suatu perkara yang muncul ditengah-tengah umat. Muadz menjawab, bahwa ia akan memutuskan dengan Alquran, dan as sunnah, dan jika tidak didapati di keduanya ia akan berijtihad. Maka Rasulullah pun tersenyum tanda menyetujui dan percaya akan kompetensi Muadz sebagai qadi Yaman.⁴

Konsep Pendidikan Islam Menuju Pembentukan *Civil Society*

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab yang selalu menjunjung tinggi konsep pendidikan menuju masyarakat madani dan prinsip-prinsip masyarakat yang beradab yang telah diuraikan dalam pembahasan, yaitu: Keadilan sosial, Egalitarianisme, Pluralisme, Supremasi hukum. Masyarakat madani dalam pendidikan islam adalah pelaku atau subyek pendidikan untuk mewujudkan pendidikan islam yang beradab.

Konsep masyarakat yang sesuai dengan pendidikan Islam adalah masyarakat beradab. Masyarakat beradab dalam terminology barat disebut *civil Society*, sementara itu pada terminology arab (Islam) disebut masyarakat madani. Adapun yang lebih penting dari kedua istilah tersebut adalah bagaimana proses berjalan dan hasil yang akan dicapai nantinya oleh masyarakat madani / *civil society*.⁵ Masyarakat beradab dapat dikonseptualisasikan sebagai *civil society* atau masyarakat madani. Meskipun memiliki makna dan sejarah sendiri, tetapi keduanya, *civil society* dan masyarakat madani merujuk pada semangat yang sama

⁴ T. An Nabhani, *Daulah Islamiyah*, terj. (Jakarta: HTI Press, 2007), h. 16-17.

⁵Anan Nur. <http://anan-nur.blogspot.com/2011/06/menggagas-penyelenggaraan-pendidikan.html>. di akses tanggal 23 Desember 2012.

sebagai sebuah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial.⁶

Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Selama ini, upaya pembaharuan pendidikan Islam secara mendasar, selalu dihambat oleh berbagai masalah mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli. Padahal pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas.⁷

Berdasarkan uraian ini, ada dua alasan pokok mengapa konsep transformasi pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani sangat mendesak di antaranya; (a) konsep dan praktek pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani; (b) lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia disegala bidang, oleh karena itu untuk menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam,

Konsep dasar teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat madani di mana pendidikan itu akan diterapkan. Apabila terlepas dari konteks “masyarakat madani”, maka pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam pada kondisi masyarakat madani tersebut..

⁶Ali Nurdin, Syaiful Mikdar, Wawan Suharmawan. *Mkdu4221 Pendidikan Agama Islam*. http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=54:mkdu-4221-berkehidupan-bermasyarakat&catid=33:mkdu&Itemid=77. Diakses tanggal 23 oktober 2011.

⁷ A. Syafi'i Maarif, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 11-13.

Oleh karena itu, usulan perubahan sebagai berikut : (a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena, dalam pandangan seorang muslim, ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah SWT, (b) pendidikan menuju tercapainya sikap dan perilaku toleransi, lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (c) pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (d) pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur, dan (e) pendidikan Islam harus didisain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat madani. Demikian juga untuk mewujudkan masyarakat madani salah satu konsep pendidikan adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Tujuannya ialah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis dan sangat toleran dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi.⁸

Demokratisasi pendidikan tidak harus dimulai dari sistem pendidikan berskala nasional. Bahkan akan lebih efektif kalau dimulai dari sistem pendidikan berskala lokal berupa pendidikan di dalam kelas. Dalam proses PBM di kelas, demokrasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma peradaban, sebab menurut Zamroni Hardjowiriono⁹ hal ini merupakan inti dari proses pendidikan. Pelaksanaan demokratisasi pendidikan di kelas harus mampu membawa peserta didik untuk menghargai kemampuan teman dan guru, kemampuan sosial-ekonomi teman dan guru, kebudayaan teman dan guru, dan sejumlah kemajemukan lainnya.

Di samping itu, menurut Battle seperti yang dikutip Shannon (1978: 32) demokratisasi pendidikan dalam PBM juga dapat ditempuh dengan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia sekarang yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakatnya (pragmatisme), tanpa harus melupakan hari

⁸ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia* (Jakarta: Rosdakarya, 1999), h. 23.

⁹ Zamroni Hardjowiriono, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* (Jakarta: Gavin Kalam Utama 2011), h. 1.

kemarin. Sebagai contoh jika peserta didik kebanyakan berlatar belakang masyarakat petani, maka orang tua atau keluarganya cenderung menuntut hasil nyata dari dan Supervisi peserta didik kebanyakan berlatar belakang masyarakat nelayan, maka orang tua atau keluarganya cenderung menuntut hasil nyata dari pendidikan anaknya agar mampu meningkatkan produktivitas hasil perikanannya. Jika peserta didik kebanyakan berlatar belakang masyarakat bisnis, maka orang tua atau keluarganya cenderung menuntut hasil nyata dari pendidikan anaknya agar mampu meningkatkan produktivitas usaha bisnisnya, dan seterusnya. Contoh-contoh tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam melakukan inovasi pendidikan yang berkonteks demokratisasi pendidikan perlu diperhatikan masalah-masalah pragmatik yakni mulai dari pemilihan materi ajar, penentuan tujuan, pemilihan metode, pemilihan evaluasi hasil belajar, output lulusan, sampai kebutuhan yang diharapkan dunia kerja. Hal ini cukup beralasan karena pengajaran yang kurang menekankan pada konteks pragmatik pada gilirannya akan menyebabkan peserta didik akan terlepas dari akar budaya dan masyarakatnya. Hal ini juga dinyatakan oleh Barnadib (1997: 1) bahwa pendidikan memang sebagai upaya mengembangkan kemanusiaan dan pengalihan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya pengajaran pragmatik yaitu pengajaran yang menekankan pada aspek fungsi akan menjadi salah satu alternatif pencapaian pengajaran yang berwawasan kemanusiaan dan peradaban. Oleh sebab itu, di dalam PBM yang pragmatik akan tercipta suasana kondusif bagi demokratisasi pendidikan.

Dengan konsep pendidikan di atas akhirnya dapat dijadikan desain model pendidikan Islam untuk membangun masyarakat madani. Dalam bentuk operasionalnya sebagai berikut:

1. Mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian visi misi dan tujuan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

2. Model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan, yaitu benar-benar sesuai dengan konsep-konsep Islam.
3. Model pendidikan agama Islam tidak hanya dilaksanakan di sekolah formal tetapi juga di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga masyarakat sehingga pendidikan agama dapat ditanamkan dan disosialisasikan yang menjadi kebutuhan peserta didik, akhirnya pendidikan agama Islam bukan lagi berupa pengetahuan yang di hafal tetapi menjadi kebutuhan dan perilaku aktual.

Dalam konteks ini juga perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga- lembaga pendidikan Islam yang ada.¹⁰ Memang diakui bahwa penyesuaian lembaga-lembaga pendidikan akhir-akhir ini cukup menggembirakan, artinya lembaga-lembaga pendidikan memenuhi keinginan untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu umum dan ilmu agama serta keterampilan. Tetapi pada kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan dengan tambal sulam atau dengan kata lain mengadopsi model yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum, artinya ada perasaan harga diri bahwa apa yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum dapat juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agama, sehingga akibatnya beban kurikulum yang terlalu banyak dan cukup berat dan bahkan terjadi tumpang tindih. Lembaga-lembaga pendidikan Islam mengambil secara utuh semua kurikulum (non-agama) dari kurikulum sekolah umum, kemudian tetap mempertahankan sejumlah program pendidikan agama, sehingga banyak bahan pelajaran yang tidak dapat dicerna oleh peserta didik secara baik, sehingga produknya (hasilnya) serba setengah-tengah atau tanggung baik pada ilmu-ilmu umum maupun pada ilmu-ilmu agama. Untuk itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam sebenarnya mulai memikirkan kembali disain program pendidikan untuk menuju masyarakat madani, dengan memperhatikan relevansinya dengan bentuk atau kondisi serta ciri

¹⁰ Anwar Jasim, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 15.

masyarakat madani. Maka untuk menuju “masyarakat madani”, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendisain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan umum atau mengkhususkan pada disain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif, misalnya mempersiapkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia.

Kelembagaan dan Sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam

IAIN ini bermula dengan dua bagian yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN dengan cepat berkembang menjadi sebuah Institut dengan empat fakultas, yang pada tiap fakultasnya kuliah selama 3 tahun, dan dapat dilengkapi dengan spesialisasi selama dua tahun. Keempat fakultas tersebut adalah: (1) Fakultas Ushuluddin, yang terdiri dari segi-segi ilmu agama Islam yang spekulatif, seperti filsafat, tasawuf, perbandingan agama dan dakwah; (2) Fakultas Syariah, yang menekankan aspek-aspek praktis dari agama yurisprudensi, tafsir, pengetahuan hadis dan sebagainya; (3) Fakultas Tarbiyah, yaitu yang bergerak di bidang pendidikan dan keguruan, yang mempersiapkan guru agama; dan (4) Fakultas Adab atau Ilmu Kemanusiaan, untuk spesialisasi Sejarah Islam serta Bahasa Arab secara khusus. IAIN-IAIN tersebut di atas dilengkapi dengan beberapa fakultas di lingkungannya serta tidak sedikit yang mempunyai fakultas cabang yang tersebar ke berbagai daerah. Di antara IAIN tersebut juga sudah ada yang melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi yaitu pada tingkat Program Pasca Sarjana (S2), bahkan Program Doktorat (S3). Di samping lembaga pendidikan tinggi negeri (IAIN) di lain pihak perguruan tinggi Islam swasta pun juga berkembang pesat, terlebih lagi dengan diresmikannya lembaga pendidikan tinggi Islam swasta ini dengan nama Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.¹¹

¹¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. ix.

Sampai saat ini secara bertahap telah lahir 14 buah IAIN dan 36 buah STAIN di seluruh Indonesia di antaranya:

1. IAIN Sunan Kalijaga
2. IAIN Syarif Hidayatullah
3. IAIN ar-Raniry
4. IAIN Raden Fatah
5. IAIN Antasari
6. IAIN Alaudin
7. IAIN Sunan Ampel
8. IAIN Imam Bonjol
9. IAIN Sultan Thaha Saefuddin
10. IAIN Sunan Gunung Jati
11. IAIN Raden Intan
12. IAIN Walisongo
13. IAIN Syarif Qasim
14. IAIN Sumatera Utara

Didirikannya lembaga IAIN dan STAIN dengan maksud untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pesat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu agama Islam.¹²

Di samping itu, terdapat pula perguruan tinggi Islam seperti: UII, UM (Universitas Muhammadiyah), UNISBA (Universitas Islam Bandung), UNISMA (Universitas Islam Malang), dan UISU (Universitas Islam Sumatera Utara). Universitas-universitas tersebut memiliki fakultas agama yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perguruan Tinggi Agama (PTA), kemudian dilimpahkan ke IAIN setelah terbentuk KOPERTAIS (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) yang diketuai oleh Rektor IAIN di masing-masing daerah. Sedangkan fakultas-fakultas non agama berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹³

¹² Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Medan: IAIN Press 2002), h. 110.

¹³ Asrohah, *Sejarah*, h. 48.

Konversi IAIN-STAIN-UIN

Setelah lebih dari setengah abad, 53 tahun dihitung semenjak 26 September 1951 hingga 26 September 2004, IAIN Sunan Kalijaga terlibat aktif mengikuti segala dinamika perubahan zaman dan menghadapi serta menjawab semua bentuk tantangan yang timbul. Sekarang, Lembaga Pendidikan Tinggi Islam ini, dibukakan peluang serta dipersilakan mereformasi diri. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia, menetapkan bahwa mulai 23 Januari 2004 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keputusan Bersama yang juga mengubah status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Sesungguhnya pemikiran dan gagasan mengubah IAIN menjadi universitas sudah lama dilontarkan. Pada waktu Menteri Agama dijabat oleh KH Wahib Wahab, pemerintah Indonesia (dalam hal ini Departemen Agama) ingin menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada rektor atau Syeikh al-Akbar Universitas Islam Al-Azhar Mesir, Muhammad Syaltout, melalui IAIN. Al-Azhar pada waktu itu sudah mereformasi diri untuk kesekian kalinya, hingga menjadi Universitas dengan beberapa fakultas, sebagaimana sudah ditulis di atas. Yang bersangkutan keberatan, karena ia menganggap IAIN hanyalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang sama tingkatannya dengan sebuah akademi di Mesir. Atas dasar yang sangat teknis itu, muncullah usul perubahan nama IAIN menjadi Universitas. Hanya saja usul tersebut ditolak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Jalan keluar untuk menghilangkan kesan M. Syaltout terhadap IAIN yang hanya setingkat sebuah akademi itu adalah melengkapi nama IAIN dengan tambahan al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah. Mulai saat itu dikukuhkanlah nama Perguruan Tinggi Islam ini menjadi Institut Agama Islam Negeri al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah. Tarmizi Taher, sewaktu menjabat Menteri Agama RI, menggagas kembali perubahan IAIN menjadi UIN. Motivasi yang melatarbelakangi gagasan perubahan ini berbeda dengan motivasi gagasan perubahan yang diusulkan KH. Wahib Wahab. Gagasan Menteri ini untuk

mengubah nama IAIN menjadi UIN didasarkan atas keinginannya untuk menata strategi pendidikan Islam secara terpadu. Dalam salah satu ceramahnya dia mengatakan, bahwa dikotomi pendidikan Islam akan menimbulkan bencana budaya, intelektual, dan rohaniah bagi umat Islam. Untuk menghilangkan dikotomi itu Departemen Agama akan berusaha mengembangkan program kerja yang 70% dari padanya adalah program pendidikan. Dana, tenaga, pikiran, dan waktu akan dikerahkan ke arah itu untuk menunjangnya. Untuk mengawali proses Universitas Islam itu, menurut Menteri Agama (waktu itu), Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan diubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Langsung ataupun tidak, dasar pemikiran tentang keterpaduan ilmu yang dikemukakan itu tentu bisa juga ada pengaruh dari perkembangan Universitas Al-Azhar.¹⁴

Konsep dasar awal pengembangan IAIN Jakarta adalah perubahan IAIN Jakarta menjadi UIN. Gagasan dan konsep tersebut bertitik tolak dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN dalam perkembangannya selama ini. Beberapa masalah pokok tersebut di antaranya adalah:

1. IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
2. IAIN belum mampu meresponi perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks.¹⁵

Berdasarkan proposal awal yang diajukan pada kuartal pertama tahun 1998, oleh IAIN Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, Tim PERTA menyimpulkan berbagai latar belakang rencana transformasi IAIN menjadi UIN sebagai berikut:

1. Harapan Publik; sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), IAIN diharapkan dapat berperan lebih banyak lagi kepada masyarakat, sebagaimana amanat USPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan

¹⁴Burhanuddin Daja, Wacana Perubahan Nama Institut, Kerja Sama Uin Suka Yogyakarta-KR (2); Menatap Masa Depan IAIN Pasca UIN, http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang... / 17 September 2004.

¹⁵Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 38-39.

Nasional) tahun 1989 bahwa lembaga pendidikan di Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditambah jumlah perguruan tinggi negeri yang telah ada belum cukup menampung masyarakat (lulusan SLTA sederajat) yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Karena itu dan untuk memenuhi harapan tersebut, sejumlah IAIN perlu diperluas dari kondisinya yang ada saat ini (hanya pengajaran ilmu-ilmu agama) menjadi sebuah universitas negeri (yang juga mengajarkan ilmu-ilmu umum).

2. Kesempatan kerja dan perluasan kualitas IAIN juga akan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga-tenaga akademik (dosen) dan administratif (karyawan). Perkembangan ini pada gilirannya akan meningkatkan kompetisi keilmuan dan profesionalisme dalam mengelola pendidikan tinggi, sehingga kualitas IAIN dan alumninya akan meningkat serta dapat berperan secara maksimal dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
3. Rekonstruksi keilmuan Perubahan IAIN menjadi UIN juga diharapkan mampu membuka peluang bagi rekonstruksi atau reintegrasi bangunan keilmuan, yang menjembatani ilmu-ilmu agama dan umum yang selama ini dipandang secara dikotomis. Pada satu sisi, ilmu-ilmu agama dapat dikontekstualisasikan, dipribumikan, atau disosialisasikan; sedangkan ilmu-ilmu umum mendapatkan sentuhan-sentuhan humanistik atau keagamaan.¹⁶

Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Islam

Menghadapi berbagai tantangan masa depan, baik yang berdimensi makro global, berskala mikro nasional, maupun yang berhubungan dengan aspek teknis lokal, maka diperlukan pengembangan pendidikan yang meliputi segala jenis dan jenjang, agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari perspektif tersebut, maka pembangunan pendidikan merupakan agenda nasional yang sangat strategis, mengingat beberapa argumen : (1) pendidikan dimaknai

¹⁶ Ahmad Haris, *Paradigma Wider Mandate dan Perubahan IAIN Menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Kasus IAIN STS Jambi*, dalam Andito (ed), *Paradigma Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 116-117.

sebagai upaya melakukan investasi sumberdaya manusia yang mempunyai implikasi luas, (2) pendidikan akan melahirkan elit sosial yang menjadi motor kemajuan dan pelopor pembangunan, (3) pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (4) pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan martabat bangsa. Menurut Muhammad Sirozi ada empat strategi yang harus dimiliki oleh pendidikan Islam yang dapat dijadikan bahan pemikiran bagi pengembangan PTAI di era otonomi daerah di antaranya:

Pertama, strategi substantive; yaitu lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar sampai kepada tingkat tinggi harus mampu menyajikan program-program pendidikan yang komprehensif dan dalam penyajiannya tersebut harus menyentuh tiga hal dalam aspek pembelajaran sebagaimana yang dikenalkan oleh Bloom (1956) dan Krathwohl (1974), yakni aspek kognitif (pemahaman), afektif (penerimaan atau sikap), dan psikomotorik (pengalaman).

Kedua, strategi *bottom-up*, dengan strategi ini pendidikan Islam millennium ketiga harus tumbuh dari bawah. Konsep pendidikan Islam desain programnya harus sesuai dengan potensi, situasi, dan aspirasi masyarakat juga perlu mengembangkan *community based education* (pendidikan berbasis masyarakat) serta dalam pengembangannya harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat tidak dari atas ke bawah, namun dari bawah ke atas, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam keberadaan lembaga pendidikan Islam yang di lingkungan mereka agar memiliki concern (kepedulian), sense of belonging (rasa memiliki) dan sense responsibility (rasa turut bertanggung jawab terhadap pendidikan Islam).

Ketiga, strategi *deregulatory*; dalam hal ini pendidikan Islam sebaiknya tidak terlalu terikat pada ketentuan-ketentuan baku yang terlalu sentralistik dan mengikat. Namun diperlukan kebijakan khusus dari Departemen Agama agar tidak terkesan liar dan anarklis. Lembaga pendidikan Islam harus diberi kebebasan berkreasi dan berimprovisasi. Utamanya dalam mendesain kurikulum, khususnya kurikulum lokal, mengembangkan sumber belajar, merekrut tenaga pengajar, terlebih tenaga pengajar luar biasa sehingga dapat mengembangkan program-programnya sesuai dengan sifat yang dimilikinya.

Keempat, strategi *kooperatif*; lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan system manajemen yang professional yang mampu merangkul semua potensi yang ada dalam masyarakat. Para pengelola pendidikan Islam harus pro-aktif dan kreatif menciptakan peluang-peluang dana di luar pundit-pundi yang telah disediakan oleh Departemen Agama atau yayasan yang mengelolanya, sehingga tidak hanya mengharapkan uluran tangan Departemen Agama saja.¹⁷

Paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah otonomi, mutu pendidikan, akuntabilitas, evaluasi diri dan akreditasi. Fokus pengembangan pendidikan tinggi bertumpu pada paradigma baru yaitu daya saing bangsa, kesehatan organisasi dan otonomi perguruan tinggi yang berpedoman pada kerangka pengembangan pendidikan tinggi. Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, institusi pendidikan tinggi harus menjadi organisasi yang sehat, dan dalam organisasi yang sehat peningkatan mutu berkelanjutan dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mutu pendidikan tinggi ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi menetapkan dan mewujudkan visi melalui misi yang harus dilaksanakan dan kemampuan memenuhi kebutuhan stakeholders yang meliputi kebutuhan dunia kerja masyarakat dan kebutuhan profesional.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pendidikan tinggi harus mampu menciptakan masyarakat ilmu pengetahuan yang memiliki semangat menghadapi era persaingan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Itulah sebabnya pendidikan tinggi harus menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang tergambar pada pengelompokan mata kuliah, proses pembelajaran dan evaluasi, pengadaan fasilitas, perubahan perilaku, serta peran dosen dan mahasiswa.

Dalam dasawarsa terakhir ini (sejak 1993), dunia perguruan tinggi Islam di Indonesia khususnya IAIN dan STAIN, menggeliat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi secara lokal maupun global. Wujudnya adalah memperluas kewenangan yang telah dimilikinya selama ini, yang kemudian disebut dengan program *wider mandate* (mandat yang diperluas) atau yang

¹⁷ Muhammad Sirozi, *Agenda Strategi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2004), h. 71-74.

disingkat WM serta melakukan transformasi atau perubahan dari IAIN/STAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, jelas mempunyai kontribusi terhadap model keberagamaan masyarakat muslim Indonesia. Studi Islam yang dikembangkan di IAIN tidak hanya mendukung model keberagamaan inklusif di kalangan masyarakat muslim Indonesia, lebih dari itu juga menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Di sisi lain adanya pendapat bahwa lulusan IAIN kurang mampu memenuhi kebutuhan pasar secara global karena tidak mampu mandiri dan ketergantungan ilmunya yang terbatas dipersiapkan untuk memenuhi keperluan Departemen Agama. Sesuai dengan tujuan institusionalnya, IAIN cenderung mempersiapkan alumninya menjadi pegawai negeri terutama di lingkungan Departemen Agama dan menjadikan calon ulama yang mampu berperan dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pencapaian tujuan, IAIN mengalami berbagai hambatan baik internal maupun eksternal.¹⁸

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka IAIN harus lebih membuka diri untuk menyahtuti tuntutan masa depan. Dalam rangka untuk menyahtuti perkembangan jaman ada tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian, pertama masalah kurikulum yang senantiasa dievaluasi agar sesuai dengan kemajuan zaman, kedua kualitas, dan ketiga pembaruan kelembagaan.¹⁹

Pada kenyataannya kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai ilmu tersebut secara kompleks. Hal itu disebabkan terutama bidang kajian agama merupakan spesialisasi IAIN kurang mengalami interaksi dengan ilmu-ilmu umum. Bahkan masih cenderung dikotomis.²⁰ Namun begitu dalam pengembangan lembaganya banyak hal yang telah dilakukan dalam rangka meminimalisir problema yang menjadi kendala.

Upaya-upaya kearah peningkatan IAIN terus dilaksanakan, di antaranya upaya peningkatan pendanaan, peningkatan peranan organisasi IAIN,

¹⁸Haris, *Paradigma*, h. 106.

¹⁹Haidar, *Pendidikan*, h. 131.

²⁰ A. Hasjmy, *Mengapa Umat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 19.

kurikulum, peningkatan mutu dosen dan peningkatan sarana fisik. Terhadap upaya tersebut dilakukan musyawarah beberapa kali bersama rektor-rector IAIN seluruh Indonesia. Demikian pula upaya perbaikan tersebut banyak dilakukan pada masa H.A. Mukti Ali menjabat sebagai menteri Agama; karena beliau sangat mengetahui kelemahan-kelemahan pokok IAIN di antaranya: 1) kekurangan dalam system dan metode; 2) kekurangan dalam mental ilmu; dan 3) kekurangan dalam penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Atas dasar kelemahan tersebut, maka diadakan berbagai perbaikan yang dituangkan dalam bentuk Garis-Garis Besar Pembinaan IAIN yang meliputi 7 bidang yaitu; 1) organisasi; 2) kurikulum; 3) personil; 4) materil; 5) pembiayaan; 6) penelitian; dan 7) kemahasiswaan.

Perbaikan lainnya antara lain telah dilakukan rasionalisasi IAIN dengan system *phasing out system* bagi fakultas-fakultas yang tidak memenuhi persyaratan akademik berangsur-angsur dihapuskan kemudian disalurkan ke fakultas induk di ibu kota provinsi. Selain itu dilakukan peningkatan kualitas dosen dan membuka S-2 dan sebagiannya diizinkan untuk membuka S-3.²¹

Penutup

Terminologi masyarakat madani yang secara etimologi mempunyai dua arti yaitu; masyarakat kota dan masyarakat yang beradap (masyarakat tamaddun). Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *civilty* atau *civilation*, dalam makna ini masyarakat madani dapat berarti dengan *Civil Society* yaitu masyarakat yang menjunjung peradaban. Berdasarkan gambaran masyarakat madani di atas, maka dapat kita lihat beberapa karakteristik sebagai berikut: (a) Masyarakat kota yang berperadaban dan mampu menciptakan peradaban. (b) Masyarakat yang memiliki pola kehidupan yang benar; (c) Masyarakat yang terbuka, pluralistik menjamion kebebasan beragama, jujur, adil, mandiri dan menghormati hak asasi manusia.

Perubahan paradigma pendidikan Islam dari paradigma yang berorientasi pada pendidikan masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan. Seperti paradigma dualisme pendidikan Islam yaitu adanya dikotomi

²¹ Haidar, *Sejarah*, h. 129-130.

ilmu yang menjadi bidang garapan pendidikan Islam yakni ilmu agama dan ilmu umum. Paradigma yang mengawetkan kemajuan ke paradigma yang merintis kemajuan, paradigma yang sentralistik ke paradigma yang desentralistik, proses pendidikan yang berorientasi *teacher center* ke *student center*, pendidikan yang selama ini difokiskan dengan pengajaran (*teaching*) harus difokuskan ke pendidikan (*learning*).

Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam A Framework for an Islamic Philosophy of Education*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1991.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* Jakarta: Kompas, 2002.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2001.
- _____. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Medan: IAIN Press 2002.
- Djohar, “*Pendidikan yang Membebaskan sebagai Konstruksi Masyarakat Madani*”, dalam *Membongkar ‘Mitos’ Masyarakat Madani*, Cet. ke – 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2000.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Haris, Ahmad. *Paradigma Wider Mandate dan Perubahan IAIN Menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Kasus IAIN STS Jambi*, dalam Andito (ed), *Paradigma Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Hasjmy, A. *Mengapa Umat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hardjowiriono, Zamroni. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* Jakarta: Gavin Kalam Utama 2011.
- Jasin, Anwar. *Pembaharuan Kurikulum Sekolah dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Ma’arif, Ahmad Syafii. *Universalisme Nilai – Nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Profetika* Vol. 1. No. 2, Jakarta, 1999.
- _____, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- An Nabhani, T. *Daulah Islamiyah*, terj. Jakarta: HTI Press, 2007.
- Tilaar, H.A.R. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Jakarta: Rosdakarya, 1999.
- Yasin, A. Fatah. *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, Malang: UIN Malang Press. 2008.